

Membangkitkan Kekuatan UMKM: Strategi dan Dampak Program Bantuan di Sulawesi Selatan

Empowering SMEs: Strategy and Impact of Aid Programs in South Sulawesi

Abdul Safrin D Talli ^{1*}

Sulaiman ²

¹Manajemen, Universitas Indonesia Timur, Makassar

²Manajemen, Universitas Indonesia Timur, Makassar

email: abdulsafrin28@gmail.com

Kata Kunci

Bantuan modal UMKM
Pemulihan ekonomi
Implementasi program

Keywords:

MSME capital assistance
Economic recovery
Program implementation

Received: Juli 2024

Accepted: Juli 2024

Published: Juli 2024

Abstrak

Penelitian ini mengkaji implementasi program bantuan modal bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Sulawesi Selatan selama pandemi COVID-19. Fokus utama adalah untuk mengeksplorasi strategi implementasi, tantangan yang dihadapi, serta dampak positif yang diharapkan dari program tersebut. Metode penelitian ini melibatkan analisis data sekunder dan wawancara mendalam dengan informan kunci dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Selatan. Temuan menunjukkan bahwa meskipun program ini menunjukkan komitmen dalam mendukung UMKM sebagai pilar pemulihan ekonomi regional, masih ada tantangan seperti verifikasi data yang kompleks dan kurangnya sosialisasi yang efektif kepada pemangku kepentingan. Pemberdayaan UMKM melalui bantuan modal diharapkan dapat meningkatkan daya saing, produksi, dan akses pasar, dengan kontribusi yang signifikan terhadap ekonomi lokal.

Abstract

This study examines the implementation of capital assistance programs for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in South Sulawesi during the COVID-19 pandemic. The primary focus is to explore implementation strategies, challenges encountered, and the expected positive impacts of these programs. The research methodology involved secondary data analysis and in-depth interviews with key informants from the Department of Cooperatives and SMEs of South Sulawesi Province. Findings indicate that while the program demonstrates commitment to supporting MSMEs as a pillar of regional economic recovery, there are challenges such as complex data verification and ineffective stakeholder engagement. Empowering MSMEs through capital assistance is expected to enhance competitiveness, production, and market access, thereby significantly contributing to the local economy..



© Year Author(s). Published by Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Timur <https://jurnal.uit.ac.id/IPE>. This is Open Access article under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>) DOI: <https://doi.org/10.36090>

PENDAHULUAN

Dalam upaya memenuhi kebutuhan sehari-hari, manusia cenderung melakukan berbagai aktivitas baik secara mandiri maupun melalui kerjasama dengan orang lain. Koperasi menjadi salah satu bentuk kerjasama ekonomi masyarakat yang signifikan dalam konteks ini, memungkinkan anggotanya untuk bersama-sama mengoptimalkan sumber daya dan mencapai kepentingan bersama. Koperasi di Indonesia, sebagai wadah ekonomi berbasis kekeluargaan, memberikan kesempatan bagi anggotanya untuk berpartisipasi dalam berbagai aspek ekonomi, dari produksi hingga distribusi, dengan prinsip kesetaraan dan keadilan. (Antu et al., 2021)

Pembangunan Usaha Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia memiliki peran integral dalam perekonomian nasional. UMKM tidak hanya berfungsi sebagai penyedia lapangan kerja, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi lokal yang memberdayakan masyarakat (Csath, 2021). Namun, UMKM sering kali menghadapi tantangan signifikan seperti keterbatasan modal, teknologi, dan akses pasar yang mempengaruhi potensi pertumbuhannya. Dalam konteks ini, pembinaan dan pengembangan UMKM menjadi krusial untuk meningkatkan daya saing dan kontribusinya terhadap ekonomi nasional. (Sani, 2020)

Kota Makassar, sebagai salah satu pusat ekonomi regional di Indonesia, aktif dalam memperkuat koperasi dan UMKM melalui berbagai program pelatihan dan pengembangan. Fokusnya termasuk memperbaiki infrastruktur, membangun kapasitas SDM, dan meningkatkan akses terhadap sumber daya yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Namun, dalam rangka mencapai tujuan ini, diperlukan pengawasan yang efektif dan efisien terhadap kegiatan koperasi dan UMKM untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan pembinaan yang berkelanjutan. (Wulandari et al., 2019)

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi model pelaksanaan pengawasan eksternal yang diterapkan oleh Dinas Koperasi terhadap Usaha Kecil dan Menengah di Kota Makassar. Pengawasan ini penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan dalam operasional koperasi dan UMKM. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi pengawasan, seperti kendala infrastruktur, kekurangan sumber daya manusia yang berkualitas, dan permasalahan hukum yang mempengaruhi efektivitas pengawasan.

Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi konsep pengawasan menurut S.P. Siagian, yang menekankan pentingnya evaluasi terhadap aktivitas lapangan dan kepatuhan terhadap rencana operasional. Selain itu, teori mengenai koperasi sebagai bentuk organisasi ekonomi berbasis kekeluargaan dan UMKM sebagai pilar ekonomi lokal akan memberikan pandangan mendalam tentang peran dan tantangan yang dihadapi dalam pengawasan terhadap kedua entitas ini. (Kertati, 2021)

Koperasi di Indonesia didefinisikan sebagai badan usaha yang melayani kepentingan anggotanya berdasarkan prinsip kekeluargaan dan gotong-royong (Tul Ramadani et al., 2021). Namun, dalam praktiknya, koperasi sering menghadapi tantangan dalam mempertahankan esensi keanggotaan dan menghindari penetrasi kepentingan eksternal yang dapat mengganggu stabilitas internal. Oleh karena itu, pengawasan eksternal yang efektif diperlukan untuk menjaga kemandirian dan integritas koperasi sebagai lembaga ekonomi yang berbasis sosial. (Antu et al., 2021)

Usaha Kecil Menengah (UMKM) memainkan peran penting dalam menggerakkan perekonomian lokal dengan memberdayakan potensi ekonomi masyarakat lokal. Namun, berbagai kendala seperti keterbatasan modal, teknologi, dan akses pasar sering kali menjadi hambatan utama dalam pertumbuhan UMKM. Dalam

konteks inilah, pentingnya dukungan dan pengawasan dari pemerintah dan lembaga terkait untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan UMKM menjadi krusial. (Aqshal Bagoes Avanzar Noegroho & Arif, 2023).

Konteks permasalahan eksternal seperti iklim usaha yang belum sepenuhnya kondusif, keterbatasan sarana dan prasarana, serta kurangnya dukungan dalam bentuk pembinaan manajemen dan peningkatan SDM menjadi fokus dalam penelitian ini. Melalui identifikasi dan analisis mendalam terhadap faktor-faktor ini, diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konkret untuk perbaikan kebijakan dan praktik pengawasan terhadap koperasi dan UMKM di Kota Makassar.

Secara keseluruhan, penelitian ini akan memberikan kontribusi penting dalam memperkuat praktik pengawasan terhadap koperasi dan UMKM, serta memberikan pandangan yang lebih holistik mengenai tantangan dan peluang dalam membangun ekonomi lokal yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi landasan bagi perbaikan kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di tingkat lokal maupun nasional..

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami realitas sosial terkait dengan model pengawasan pada kantor Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulsel serta mengidentifikasi hambatan-hambatannya. Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena tersebut dari perspektif yang mendalam, memperlakukan peneliti sebagai instrumen utama dalam pengumpulan dan analisis data. Sumber data utama diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung dengan responden terkait di lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumentasi dan informasi yang disediakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulsel. Pendekatan ini memungkinkan untuk menyoroti makna dan konteks yang lebih dalam dari fenomena yang diteliti, serta menangkap kompleksitas dalam model pengawasan dan tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Metode Pengawasan

Penelitian ini mengungkapkan beberapa permasalahan terkait dengan konsep pengawasan di Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Selatan. Pengawasan yang seharusnya meliputi kegiatan pembinaan, pemantauan, pemeriksaan, dan evaluasi untuk memastikan kegiatan koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ternyata lebih cenderung kepada pembinaan, pemberdayaan, dan fasilitasi. Ini ditegaskan dalam wawancara dengan Kepala Seksi Kelembagaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Bu

Munira, yang menekankan bahwa Dinas lebih berfokus pada memberikan dukungan seperti surat keterangan usaha atau sertifikasi UMKM, serta pelatihan dan sosialisasi untuk mengembangkan UMKM.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Koperasi dan UMKM tidak secara langsung menjalankan bentuk pengawasan tradisional, melainkan lebih kepada upaya-upaya pengembangan dan pemberdayaan UMKM. Meskipun begitu, Dinas tetap memantau perkembangan UMKM dengan cara mengumpulkan data dari berbagai kabupaten/kota dan memantau peningkatan jumlah UMKM yang dibentuk setiap tahunnya. Dalam konteks ini, kerja sama antara UMKM dengan usaha besar menjadi penting, di mana UMKM dapat saling bermitra untuk memasarkan produk ke daerah lain atau memenuhi kebutuhan bahan baku, menunjukkan adanya sinergi yang berpotensi untuk meningkatkan ekonomi lokal secara keseluruhan.

Pentingnya pembinaan dan pemberdayaan UMKM juga diakui sebagai strategi untuk memperluas peran UMKM dalam perekonomian nasional. Hal ini terbukti dari upaya Dinas dalam menyediakan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan untuk mendukung kemajuan UMKM, sehingga mampu menghasilkan produk berkualitas yang kompetitif di pasar global. Dukungan dari pemerintah dalam hal ini sangat diperlukan untuk memberikan fasilitas yang optimal bagi UMKM dalam menjalankan usahanya, mencapai efisiensi sumber daya manusia, dan menemukan peluang-peluang pelatihan yang sesuai dengan bidang yang digeluti oleh UMKM.

Tabel 1. Jumlah UMKM yang Terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Selatan

NO	KAB/KOTA	2020				
		MIKRO	KECIL	MENENGAH	BESAR	
1	Selayar	19,007	858	32	7	19,904
2	Bulukumba	88,676	3,137	136	84	92,033
3	Bantaeng	39,262	1,306	30	10	40,607
4	Jeneponto	114,182	3,350	58	16	117,606
5	Takalar	116,863	4,334	68	29	121,294
6	Gowa	86,833	10,284	147	30	97,294
7	Sinjai	42,657	2,016	48	15	44,736
8	Maros	20,665	4,075	92	40	24,872
9	Pangkep	50,104	3,365	77	31	53,577
10	Barro	11,904	1,901	40	19	13,864
11	Bone	43,652	7,009	105	56	50,822
12	Soppeng	21,659	3,268	58	18	25,003
13	Wajo	33,008	6,220	158	45	39,431
14	Sidrap	86,608	3,098	61	17	89,784
15	Enrekang	30,689	1,817	48	11	32,565
16	Luwu	15,419	2,401	46	16	17,882
17	Tana Toraja	22,833	1,382	45	24	24,284
18	Luwu Utara	26,853	3,613	89	26	30,581
19	Luwu Timur	20,273	2,414	99	30	22,816
20	Makassar	146,602	35,731	1,447	670	184,450
21	Parepare	26,761	2,565	96	37	29,459
22	Palopo	30,142	2,838	104	47	33,130
23	Pinrang	25,234	4,269	86	31	29,621
24	Toraja Utara	23,854	3,467	15		27,336
JUMLAH		1,143,740	114,718	3,185	1,309	1,262,952

Sumber: Hasil Olah Data Penelitian (2022)

Membangun dan Mengembangkan Potensi

Hasil penelitian ini mengungkap beberapa poin inti terkait dengan pemberdayaan koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Sulawesi Selatan:

1. Kontribusi UMKM dalam Ekonomi: Pada sensus ekonomi tahun 2016, UMKM menyumbang sekitar 98,33% dari total usaha di wilayah tersebut, menunjukkan peran dominan mereka dalam struktur ekonomi lokal. Fokus utama pemberdayaan adalah untuk memperkuat kontribusi UMKM dalam menanggulangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan nilai tambah perekonomian.
2. Kebijakan Pemberdayaan: Dalam lima tahun ke depan, pemerintah akan melaksanakan kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan daya saing dan kinerja UMKM. Ini termasuk peningkatan kapasitas usaha, perluasan peran sistem pendukung usaha, dan penciptaan iklim usaha yang lebih kondusif. Pemberdayaan ini juga mencakup perbaikan lingkungan usaha, seperti peraturan, biaya transaksi, formalisasi usaha, serta peran pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam mendukung perkembangan koperasi dan UMKM.
3. Peran Kunci: pemerintah memberikan bantuan melalui pembinaan, pelatihan, sosialisasi, dan fasilitasi untuk mengembangkan UMKM. Contohnya, pemerintah membantu UMKM dalam mendapatkan sertifikasi halal dan merek secara gratis, serta memberikan pelatihan dalam manajemen usaha, peningkatan kualitas produk, dan strategi pemasaran untuk memasuki pasar modern.
4. Dampak Pemberdayaan: Pemberdayaan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan daya saing UMKM, sehingga mereka dapat mengelola usahanya dengan lebih baik. Dengan adanya bantuan ini, diharapkan UMKM dapat meningkatkan produksi, memperluas pasar, dan meningkatkan kualitas produknya sehingga dapat bersaing di pasar yang semakin kompetitif.

Berdasarkan teori pengawasan, implementasi pemberdayaan UMKM di Sulawesi Selatan menunjukkan upaya yang signifikan dalam memperkuat kontribusi sektor ini dalam ekonomi lokal. Dengan UMKM menyumbang sekitar 98,33% dari total usaha di wilayah tersebut, pemberdayaan ini bertujuan untuk tidak hanya meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, tetapi juga untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi secara keseluruhan. Fokus pada peningkatan kapasitas usaha, sistem pendukung usaha yang lebih kondusif, dan perbaikan lingkungan usaha merupakan strategi yang relevan dalam konteks pengawasan. Dengan cara ini, pemerintah dapat memainkan peran penting dalam mengawasi dan mendukung pertumbuhan berkelanjutan UMKM, memastikan bahwa kebijakan dan program yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat yang signifikan bagi sektor ini. (Susanti, 2021)

Selain itu, pemberdayaan UMKM juga mencakup pemberian bantuan melalui pembinaan, pelatihan, sosialisasi, dan fasilitasi, yang sesuai dengan pendekatan pengawasan yang bersifat pembinaan. Dengan memberikan dukungan ini, pemerintah tidak hanya mengawasi dan mengontrol aktivitas UMKM secara langsung, tetapi juga memastikan bahwa mereka diberdayakan untuk meningkatkan kualitas produk, strategi pemasaran, dan daya saing mereka di pasar yang semakin kompetitif. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan pengawasan yang berorientasi pada pembinaan mampu memberikan dampak positif yang signifikan dalam pengembangan UMKM, memungkinkan mereka untuk lebih mandiri dan berkontribusi secara lebih efektif terhadap pertumbuhan ekonomi regional. (Dinutistomo & Lubis, 2021)

Memperkokoh Perekonomian

Hasil penelitian ini mengungkap beberapa poin inti terkait dengan implementasi program bantuan modal bagi UMKM di Sulawesi Selatan selama pandemi COVID-19:

1. Implementasi Program Bantuan Modal: Pemerintah pusat melalui Dinas Koperasi dan UMKM Sulawesi Selatan menyediakan bantuan modal untuk mendukung pemulihan ekonomi di tengah pandemi. Pada tahun 2020, sebanyak 11.925 unit usaha UMKM di Sulawesi Selatan menerima bantuan modal sebesar 2,4 juta per unit usaha.
2. Verifikasi dan Validasi Data: Meskipun ada upaya untuk memberikan bantuan kepada 75.000 UMKM di Sulawesi Selatan, pada tahap awal hanya sekitar 11.925 UMKM yang berhasil tervalidasi dan menerima bantuan. Proses verifikasi dilakukan oleh Kementerian Koperasi untuk memastikan bahwa UMKM yang mendapatkan bantuan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
3. Peran Pemerintah Daerah: Kota Makassar, sebagai contoh, aktif dalam mengoordinasikan distribusi bantuan modal kepada UMKM. Di sini, sebanyak 8.584 UMKM mendapatkan bantuan modal dari pemerintah pusat, dengan dorongan dari Pemerintah Kota Makassar untuk mendukung usaha-usaha lokal.
4. Tantangan dalam Distribusi: Meskipun ada upaya besar untuk mendistribusikan bantuan, masih terdapat tantangan seperti kurangnya informasi yang jelas kepada pelaku UMKM. Beberapa informan mengungkapkan bahwa mereka tidak mendapatkan informasi yang memadai atau tidak mengerti prosedur pengajuan bantuan. Hal ini menunjukkan perlunya sosialisasi dan pendampingan yang lebih intensif untuk memastikan bahwa UMKM dapat memanfaatkan bantuan dengan optimal.
5. Harapan dan Dampak Positif: Meskipun ada beberapa kendala, program bantuan modal ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam memicu pertumbuhan ekonomi lokal di Sulawesi Selatan. UMKM diharapkan dapat memanfaatkan modal tersebut untuk meningkatkan produksi, memperluas pasar, dan meningkatkan daya saing produk lokal.

Secara keseluruhan, implementasi program bantuan modal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung UMKM sebagai salah satu pilar utama dalam pemulihan ekonomi regional di Sulawesi Selatan, meskipun masih diperlukan upaya untuk meningkatkan efektivitas dan aksesibilitas informasi kepada UMKM secara lebih luas.

Implementasi program bantuan modal bagi UMKM di Sulawesi Selatan selama pandemi COVID-19 menggambarkan pendekatan pengawasan yang lebih menitikberatkan pada pembinaan dan pemberdayaan. Meskipun pemerintah pusat melalui Dinas Koperasi dan UMKM Sulawesi Selatan menyediakan bantuan modal sebagai stimulus ekonomi, proses verifikasi dan validasi data yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi merupakan langkah pengawasan yang krusial. Pengawasan ini tidak hanya bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan dialokasikan dengan benar kepada UMKM yang memenuhi syarat, tetapi juga untuk mengurangi risiko penyalahgunaan atau ketidaktepatan alokasi dana. Tantangan seperti kurangnya informasi yang jelas kepada pelaku UMKM menunjukkan bahwa pengawasan yang efektif memerlukan upaya tambahan dalam sosialisasi dan pendampingan untuk memastikan partisipasi yang maksimal serta penggunaan optimal dari bantuan yang disediakan.

Pemerintah daerah, seperti Kota Makassar, juga memainkan peran penting dalam koordinasi distribusi bantuan modal kepada UMKM. Ini mencerminkan implementasi pengawasan melalui koordinasi dan fasilitasi lokal yang mendukung tujuan nasional. Namun, untuk meningkatkan efektivitasnya, pengawasan harus tidak hanya terbatas pada distribusi fisik bantuan, tetapi juga meliputi monitoring terhadap dampak dari bantuan tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi dan daya saing UMKM. Dengan demikian, teori pengawasan tidak hanya mengacu pada kontrol fisik dan administratif, tetapi juga pada upaya yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa program-program pemberdayaan ekonomi seperti ini dapat memberikan manfaat maksimal bagi UMKM serta ekonomi regional secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Simpulan

Studi ini mengungkapkan bahwa aspek pengawasan UMKM melekat dalam kebijakan pemberdayaan UMKM di Sulawesi Selatan, baik melalui bantuan modal maupun program pembinaan, menunjukkan komitmen pemerintah dalam menguatkan sektor ekonomi lokal. Meskipun terdapat tantangan dalam distribusi dan akses informasi, pendekatan yang berfokus pada pembinaan dan pemberdayaan UMKM telah memberikan dampak positif dalam memperluas peran UMKM dalam ekonomi regional, dengan harapan dapat terus meningkatkan efektivitasnya ke depan.

Saran

Untuk studi selanjutnya, disarankan untuk mendalami lebih jauh mengenai efisiensi dan transparansi dalam distribusi bantuan modal bagi UMKM. Perlu juga dilakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai strategi pengawasan yang dapat meningkatkan partisipasi UMKM serta memaksimalkan manfaat dari program pemberdayaan ekonomi seperti ini..

REFERENSI

- Antu, Y., Mohi, E. H., Nggilu, R., Arsana, I. K. S., Binolombangan, F., & Endey, N. (2021). ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN EKONOMI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP UMKM DI KOTA GORONTALO. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 8(2). <https://doi.org/10.37606/publik.v8i2.231>
- Aqshal Bagoes Avanzar Noegroho, & Arif, L. (2023). COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN UMKM PUDAK DI KECAMATAN GRESIK KABUPATEN GRESIK. *Journal Publicuho*, 5(4). <https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.85>
- Csath, M. (2021). Crisis situations: how should micro, small and medium enterprises handle them with a long term view? In *Development and Learning in Organizations* (Vol. 35, Issue 3). <https://doi.org/10.1108/DLO-04-2020-0086>
- Dinutistomo, I. A., & Lubis, A. W. (2021). MSME lending and bank efficiency: Evidence from Indonesia. *Banks and Bank Systems*, 16(3). [https://doi.org/10.21511/bbs.16\(3\).2021.09](https://doi.org/10.21511/bbs.16(3).2021.09)
- Kertati, I. (2021). DEREGULASI DAN DEBIROKRATISASI DALAM PENGEMBANGAN UMKM MENGHADAPI PANDEMI COVID-19. *MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang*, 18(2). <https://doi.org/10.56444/mia.v18i2.2525>
- Sani, A. (2020). Standar Operational Procedures (SOP) sebagai Kunci Pembenahan Masalah dalam Mekanisme Pelaksanaan Program Pendampingan Ekspor. *Jurnal Kewidyaiswaraan*, 5(1). <https://doi.org/10.56971/jwi.v5i1.44>
- Susanti. (2021). The performance of Micro, Small and Medium Enterprises sector in the era of ASEAN-China Free Trade. *Technium Social Sciences Journal*, 17.
- Tul Ramadani, A., Junaidi, & Eliza, Z. (2021). Pengaruh pertumbuhan UMKM, inflasi, dan tingkat pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Investasi Islam*, 5(2). <https://doi.org/10.32505/jii.v5i2.2392>
- Wulandari, W., Suranto, & Priyo Purnomo, E. (2019). Collaborative Government dalam Mewujudkan Inovasi Pelayanan. *JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, 4(1). <https://doi.org/10.24905/jip.4.1.2019.13-28>